



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PAJAK DAERAH**

Jalan Jemerto Nomor 25-27 Surabaya 60222
Telepon (031) 5312144, ext. 584, 345, 388 Faksimile (031) 5351486

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070/5337/436.8.2/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Soeriyawati, S.T., M.T.

NIP : 197405132001122001

Pangkat/ Gol.: Pembina/IVa

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya Nomor : 070/5337/436.8.5/2021 tanggal 08 April 2021, perihal Penelitian, menerangkan bahwa :

Nama : Masro'atin Dwi Malviqui
Mahasiswa Jurusan S1 Akuntansi UNTAG Surabaya
NPM : 1221700148

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya tentang **Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya** mulai tanggal 08 April 2021 sampai tanggal 08 Mei 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 JUN 2021


KEPALA BADAN
Sekretaris,
Dewi Soeriyawati, S.T., M.T.
Pembina
NIP 197405132001122001



**PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
71 TAHUN 2010
TENTANG**

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Neraca

44. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
45. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
46. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima tau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
47. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
48. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
49. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a) kas dan setara kas;
 - b) investasi jangka pendek;
 - c) piutang pajak dan bukan pajak;
 - d) persediaan;
 - e) investasi jangka panjang;
 - f) aset tetap;
 - g) kewajiban jangka pendek;
 - h) kewajiban jangka panjang;
 - i) ekuitas.
50. Pos-pos selain yang disebutkan pada paragraf 49 disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.
51. Contoh format Neraca disajikan dalam ilustrasi PSAP 01.A dan 01.B Standar ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.
52. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
- a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
 - b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
 - c) Jumlah, sifat, dan jangka waktukewajiban.
53. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

PSAP 01 PARAGRAF 51 ASET NON LANCAR

51. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

PSAP 01 PARAGRAF 78 EKUITAS

78. Ekuitas Adalah Kekayaan Bersih Pemerintah Yang Merupakan Selisih Antara Aset Dan Kewajiban Pemerintah Pada Tanggal Laporan. Ekuitas Dana Meliputi Ekitas Dana Lancer,Ekuitas Danainvestasi,Ekuitas Dan Dana Cadangan

PSAP 04 PARAGRAF 28

25. Kinerja Keuangan Entitas Pelaporan Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan.
26. Kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah berbeda pemerintah sangat tertarik dengan kinerja pemerintah bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
27. Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan Secara obyektif dalam Catatan atas Laporan Keuangan Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (output) dengan masukan (input). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (outcome) dengan target yang ditetapkan.
28. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus:
 - a. Menguraikan strategi dan sumberdaya yang digunakan untuk mencapai tujuan;
 - b. Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam satu entitas pelaporan; dan pemerintah sangat tertarik dengan kinerja pemerintah bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

PSAP 04 PARAGRAF 20

Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/ Keuangan, Ekonomi Makro Pencapaian Target Undang-Undang APBN/Peraturan Daerah APBD, Berikut Kendala dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pencapaian Target.

16. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan.
17. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.
18. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode

sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

19. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBN/APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang negara.
20. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN/APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran.





18 MAR 2021



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Kampus: Jl. Semolowari 45 Surabaya 60118, Telp (031) 5925289, 0811112811128



SEMESTER
~~Genap~~ / Genap
2020, 2021

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa / NBI : MASRO'ATIN OWI MALVIQI / 1221700148
Nama Pembimbing : Dra. HENDY WIDIASTOETI, MM, CTA, CPA
Judul Skripsi : PEMBAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019
Mulai Program Skripsi : Semester Thn. Ak. Selesai Bimbingan Tanggal

No.	HARI / TANGGAL	KONSENTRASI		PARAF
		BAB / HAL	KETERANGAN REVISI	
1	24-3-21	Judul	Konsultasi	
2	1-4-21	Judul	Acc	
3	8-4-21	Proposal	Revisi	
4	28-4-21	Proposal	Acc	
5	6-5-21	Bab I	Acc	
		Bab II	Revisi, tambahkan teori SAP	
		Bab III	Revisi, proses pengalokasian data contoh skripsi	
		Bab IV	Revisi, lihat catatan ensip di folio 100 PP 24/10/2005	
6	16-6-21	Bab II & III	Revisi	
7	16-6-21	Bab IV	Revisi	
8	23-6-21	Bab I & II & III	Acc	
Sdrp Muzi				

Perpanjangan I _____
Semester _____
Th. Ak. _____
Paraf Kajar _____

Surabaya, 23-juni-2021

(Nama dan tanda tangan Pembimbing)